

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TEKANAN EKSTERNAL, KOMITMEN  
MANAJEMEN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI  
PELAPORAN KEUANGAN**

(Studi pada Satuan Kerja perangkat daerah kabupaten Indragiri Hulu)

Oleh :

**Farid Hamdi**

**Pembimbing : Hardi dan Al Azhar L**

*Faculty of Economics Riau University Pekanbaru Indonesia*

*Email : [faridhtambusai@gmail.com](mailto:faridhtambusai@gmail.com)*

*Effect of accountability, external pressure, management commitment,  
and competence of human resources on the transparency  
of financial reporting*

*(Studies in the district work unit area Indragiri Hulu)*

**ABSTRACT**

*Transparency of financial reporting requires organizations to present the financial statements are free from material false information and biased to outsiders. This is consistent with the concept of reliability of the information in the financial statements that should be free of errors and misleading understanding of the material, presenting any facts honestly, and can be verified. .This Study examined the effects of accountability, external pressure, hesitated environment, and commitment to leadership on the transparency of financial reporting. The sample studied consisted of 27 sectors in Indragiri Hulu. the analytical techniques used to test hypotheses is purposive sampling. Data were analyzed using multiple regression analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solution) 17 version. The results showed that accountability, external pressure, management commitment, and competence of human resources who do have the effect of transparency of financial reporting. Accountability was significant 0,034 0,033 external pressure was significant. Demonstrated management commitment 0.000 significance. Highlights the competence of human resources 0.000. This decision was made are all variables significant effect on the transparency of financial reporting.*

*Keywords: Accountability, External Pressure, commitment management, human resources, and financial transparency.*

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 71

Tahun 2010) sebagai pengganti (PP No 24 tahun 2005) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Nomor 21 Tahun 2011) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Artinya, semua peraturan tersebut

menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2012:19), salah satu karakteristik *good governance* yaitu adanya transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Hal ini untuk memenuhi hak dasar masyarakat (publik) terhadap pemerintah yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengendalian, dapat dilihat dari seberapa besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mampu melaksanakan elemen – elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan meliputi akuntabilitas. Dalam rangka menciptakan *good governance* dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (akuntable).

BPK RI selama periode 2009-2014 mengeluarkan berbagai opini: Pada tahun 2009 BPK RI mengeluarkan opini TMP (tidak memberikan pendapat/ disclaimer opinion) terhadap LKPD Kabupaten Inhu, pada tahun 2010 BPK RI mengeluarkan opini TW (Opini tidak Wajar/ adverse opinion) terhadap LKPD Kabupaten Inhu, tahun 2011

BPK RI mengeluarkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian/ Qualified Opinion) terhadap LKPD Kabupaten Inhu, tahun 2012 sampai tahun 2013 opini yang dikeluarkan terhadap LKPD Kabupaten Inhu yaitu WDP (Wajar dengan Pengecualian). Dan pada Semester 1 untuk LHPD Tahun 2014 adalah WDP (Wajar dengan Pengecualian). Adapun alasan mengapa BPK RI mengeluarkan Opini WDP terhadap LKPD Inhu Tahun 2014 adalah: BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: 1) Penyertaan modal di 3 (tiga) BUMD tidak berdasarkan Perda dan nilai investasi permanen pada PDAM Tirta Indra tidak dapat diyakini kewajarannya. 2) Pernyataan modal kepada PD Indragiri berupa aset tidak dapat diyakini kewajarannya, pengembalian 13 (tiga belas) aset kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum berdasarkan BAST dan biaya operasional PD Indragiri membebani APBD TA 2014. 3) Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2014 belum optimal. Sumber : (bpk.go.id Perwakilan Provinsi Riau). 4) dan Pengelolaan aset lain-lain belum optimal.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, pertimbangan objektif lainnya, prestasi kerja tidak berdasarkan kriteria yang terukur. 2) Pertanggungjawaban biaya tiket pesawat tidak sesuai dengan harga

sebenarnya, biaya perjalanan dinas melebihi tarif, indikasi perjalanan dinas tidak dilaksanakan, serta realisasi perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan. 3) Terdapat kelebihan pembayaran pada 4 (empat) paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Jaminan Pemeliharaan belum dicairkan. 4) Terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan SDN 007 Sekip Hulu (tahap I) dan tanggung jawab pemeliharaan yang belum dilaksanakan. Sumber : (bpk.go.id Perwakilan Provinsi Riau).

Dari kesimpulan diatas nyatalah bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum memenuhi untuk pencapaian penerapan transparansi yang baik sehingga perlu untuk di tingkatkan. Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.) dapat dilihat dari seberapa besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mampu melaksanakan elemen – elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan meliputi akuntabilitas. Dalam rangka menciptakan good governance dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (akuntable).

Mardiasmo (2012:20) menyatakan bahwa akuntabilitas dan

transparansi keuangan daerah merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik. Hal ini dikarenakan secara definitife, kualitas pemerintahan yang baik (Good Governance) Dan pemerintahan daerah yang bersih (Clean Governance). Di dalam Undang-Undang Nomor 32 dinyatakan bahwa selain berkewajiban melaksanakan beberapa hal seperti memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan pertanggungjawaban DPRD, masyarakat. Laporan pertanggung jawaban itu digunakan pemerintah pusat sebagai evaluasi pemerintah daerah ditentukan oleh dua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan supremasi hukum.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi SDM manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui

pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 2 Untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 3 Untuk mengetahui pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Manfaat Penelitian ini adalah: 1. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, Tekanan eksternal, komitmen manajemen dan kompetensi SDM terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai informasi bahan pembandingan bagi peneliti lain yang ingin membahas masalah ini. 3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam mengevaluasi transparansi pelaporan keuangan, khususnya pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Inhu.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP No.24 Tahun 2005). Menurut Mardiasmo (2012:19) transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi yaitu keterbukaan (openess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2012:19).

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja

dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (PP.No.71/2010). Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to) (Mardiasmo, 2012;8). Menurut Mardiasmo (2012;3) Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

#### **Akuntabilitas Publik Keuangan Daerah**

Mardiasmo (2012;35) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah merupakan tujuan penting dari reformasi sector publik. Hal ini dikarenakan secara definitive, kualitas pemerintahan yang baik ( Good Governance) Dan pemerintahan daerah yang bersih ( Clean Governance ) ditentukan oleh dua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan supremasi hukum.

#### **Tekanan Eksternal**

Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi

struktur atau sistem Ridha dan Basuki (2012). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (legitimate coercion) (Scott dalam Ridha dan Basuki, 2012), sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif (Hess dalam Ridha dan Basuki, 2012) agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi.

#### **Komitmen Manajemen**

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya dapat mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahand organisasi tersebut (Sukhemi, 2011:99).

Adapun ciri-ciri komitmen manajemen menurut Newstrom dan Davis (2012) adalah: 1. Adanya keinginan kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi 2. Kesiediaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi 3. Adanya keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi.

#### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk,2014).

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Akuntabilitas (accountability) secara bahasa dapat diartikan pertanggungjawaban. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Mulyana,2006;25).

Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi diyakini memberikan kontribusi dalam mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang banyak terjadi di pemerintah daerah melalui transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang good governance bisa tercapai. Hal ini sesuai dengan PP No 29 tahun 2014 bahwa akuntabilitas itu penting dalam mencapai transparansi pelaporan keuangan yang baik.

### **Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Tekanan eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada di luar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana strategic dan rencana operasional, sehingga

langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan (Desi Wahyuni, 2014).

Peraturan merupakan indikator tekanan eksternal dalam bentuk koersif untuk terciptanya transparansi pelaporan keuangan. Jadi, dengan adanya peraturan dan perundang-undangan ini mengakibatkan transparansi pelaporan keuangan yang relatif sama antara SKPD yang satu dengan lainnya. Dikarekana faktor peraturan sangat mendukung dalam hal pelaporan keuangan, maka dapat dikatakan bahwa tekanan eksternal mampu mempengaruhi terciptanya transparansi pelaporan keuangan.

### **Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Komitmen Manajemen adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Wikipedia,2014).

Untuk menerapkan transparansi pelaporan keuangan dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. System Manajemen yang baik yaitu jika SKPD memiliki staff yang handal, dibangunnya budaya etis secara komprehensif,dan lain-lain akan berdampak pada tercapainya transparansi pelaporan keuangan sehingga standar profesionalisme pada SKPD dapat terpenuhi. .

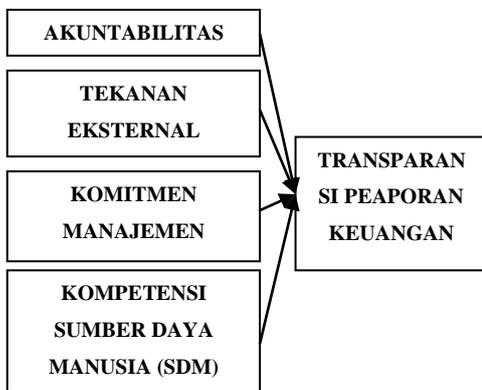
**Pengaruh Kompetensi sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Menurut Armstrong (1999:1) yang dikutip oleh Kaswan (2012:5) mendefinisikan sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia, yang berdasarkan empat prinsip dasar. Salah satunya yaitu, SDM adalah aset paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan sumber daya yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi.

**Model Penelitian**

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini digambarkan model penelitian yang digunakan :

**Gambar 1**  
**Model penelitian**



Sumber : *Data Olahan, 2016.*

**METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD pemerintah daerah (pemda) di wilayah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Sampel adalah bagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kab Indragiri Hulu (Inhu). Dari setiap SKPD akan diambil 2 responden yang memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu Kepala SKPD dan Kasubag keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 54 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi responden (Indriantoro,2002:145).

Teknik pengumpulan Data penelitian ini merupakan cross section data yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Operasional penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagikan kuesioner secara langsung ke responden. Peneliti akan memberikan waktu sekitar 25 menit kepada masing-masing responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Cara ini diharapkan dapat lebih berhasil dengan tingkat pengembalian yang dapat lebih tinggi. Untuk mengantisipasi

rendahnya respon rate peneliti melakukan langkah-langkah berikut ini :

- 1) Dalam kuesioner disampaikan peneliti memberikan kebebasan untuk mengisi identitas maupun tidak mengisi dalam hal ini mencakup nama responden tersebut.
- 2) Memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan oleh responden.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan permasalahan, tujuan, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi Pelaporan Keuangan

X1 = Akuntabilitas

X2 = Tekanan Eksternal

X3 = Komitmen Manajemen

X4 = Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

e = Error

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Transparansi Pelaporan

Keuangan sedangkan variabel independennya terdiri dari Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

### **Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)**

Transparansi Laporan Keuangan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sukhemi, 2011:33). Sedangkan menurut Silver (2005:21) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) menuntut bahwa organisasi untuk menjadi lebih transparan dalam praktiknya, tidak hanya pada jumlah yang dirilis, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Transparansi pelaporan keuangan dalam penelitian ini adalah terkait semua upaya SKPD yang secara sengaja melaporkan semua informasi keuangan yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif, akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab SKPD atas tindakan, kebijakan, dan praktik yang dilakukannya.

### **Akuntabilitas (X1)**

Akuntabilitas dalam hal ini adalah Pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. kondisi dimana SKPD bertanggungjawab berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai

piihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengenai informasi tersebut. Demi terwujudnya good governance, SKPD wajib untuk melakukan atau melaksanakan akuntabilitas demi terwujudnya transparansi dalam pelaporan keuangan kepada publik.

### **Tekanan Eksternal (X2)**

Tekanan Eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan eksternal yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), DPRD, masyarakat dan sebagainya. Frumkin dan Galaskiewicz (2007) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

### **Komitmen Manajemen (X3)**

Komitmen manajemen dalam hal ini terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Arsyadi (2012) menyatakan bahwa strategis integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut dari pada sekedar inisiatif kepatuhan atas hukum maupun peraturan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Manajemen seharusnya mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam jangka panjang. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui tindakan dan perilaku yang tepat. Selain itu,

manajemen secara pribadi juga terlibat untuk memastikan bahwa system manajemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan. System manajemen yang baik, dalam hal ini transparansi pelaporan keuangan dapat tercapai apabila SKPD memiliki staf yang andal dan kompeten dibidangnya, dibangunnya budaya etis secara komprehensif, dan lain-lain. System manajemen yang baik tersebut akan berdampak pada terpenuhinya standar profesionalisme yang seharusnya ada pada SKPD.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)**

Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintham mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, SDM sebagai faktor penentu organisasi atau lembaga pemerintahan maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga pemerintahan. Dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan tentu hal ini akan menentukan kualitas SDM yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif lembaga pemerintahan itu sendiri. (Fardian,2014).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam hal ini adalah Kepala SKPD dan Kasubag Keuangan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hulu yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. ). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Pemerintah Daerah (Pemda) di Wilayah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel berikut ini menggambarkan secara ringkas tingkat partisipasi dan pengembalian kuesioner di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

**Tabel 1**  
**Tingkat Partisipasi dan Pengembalian koesioner**

Koesioner	Jumlah	Persentase
Koesioner yang disebar	54	100%
Koesioner yang Kembali	54	100%
Koesioner yang tidak bias diolah	6	11.1%
Kuesioner yang dapat digunakan	48	88.9%

Sumber :Data Olahan, 2016.

### Hasil Uji Validitas

Nilai  $r_{tabel}$  di cari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n)= 48, maka di dapat  $r_{tabel}$  sebesar 0,284 jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pernyataannya valid dan sebaliknya.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variable	item	r-hitung	r-tabel	Status
Akuntabilitas	AKT1	0.772	0.284	VALID
	AKT2	0.585	0.284	VALID
	AKT3	0.674	0.284	VALID
	AKT4	0.671	0.284	VALID
	AKT5	0.582	0.284	VALID
	AKT6	0.699	0.284	VALID
Tekanan Eksternal	TK1	0.532	0.284	VALID
	TK2	0.712	0.284	VALID
	TK3	0.701	0.284	VALID
	TK4	0.544	0.284	VALID
	TK5	0.659	0.284	VALID
Komitmen Manajemen	KM1	0.704	0.284	VALID
	KM2	0.741	0.284	VALID
	KM3	0.681	0.284	VALID
	KM4	0.619	0.284	VALID
	KM5	0.770	0.284	VALID

Kompetensi Sumber Daya Manusia	KSDM1	0.736	0.284	VALID
	KSDM2	0.673	0.284	VALID
	KSDM3	0.600	0.284	VALID
	KSDM4	0.592	0.284	VALID
	KSDM5	0.725	0.284	VALID
Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan	TPK1	0.693	0.284	VALID
	TPK2	0.753	0.284	VALID
	TPK3	0.531	0.284	VALID
	TPK4	0.563	0.284	VALID
	TPK5	0.705	0.284	VALID

Sumber :Data Olahan, 2016.

Dari Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas , Tekanan Eksternal ,Komitmen Manajemen, Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan. Pengujian validitas ini menggunakan metode Pearson Correlation, dimana Nilai r tabel yang diperoleh dari banyaknya sampel yang berjumlah 48 orang yaitu 0,284.

### Hasil Uji Reliabilitas Data

Batasan untuk uji reliabilitas adalah 0,6. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,06 maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

**Tabel 3**  
**Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0.737	Reliabel
Tekanan Eksternal	0.615	Reliabel
Komitmen Manajemen	0.744	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.685	Reliabel
Penerapan Transparansi Pelaporan keuangan	0.652	Reliabel

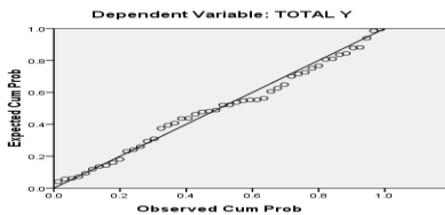
Sumber :Data Olahan, 2016.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal.Untuk melihat normalitas data dapat di lihat dari *normal*

*probability plot*. Jika menyebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar jauh dari garis lurus), maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data adalah terpenuhi. dan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas data. Dan berdasarkan gambar berikut diketahui bahwa data memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 2**  
**Normal Probability Plot**



Sumber :Data Olahan, 2016.

**Hasil Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Deteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Varian inflation factor (FIV)* dan *Tolerance*. Jika nilai  $FIV > 10$  atau nilai  $Tolerance < 0,10$  berarti Terdapat Multikolinieritas.

**Tabel 4**  
**Uji Multikolinieritas**

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	0,858	1.166
2	Tekanan Eksternal	0,497	2.013
3	Komitmen Manajemen	0,430	2.323
4	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,338	2.957

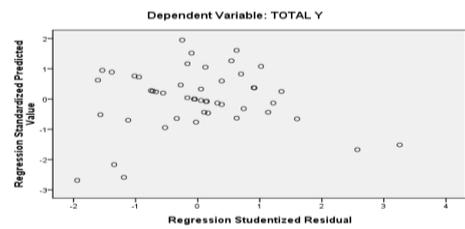
Sumber :Data Olahan, 2016.

**Hasil Uji heterokedastisitas**

Pengujian asumsi heterokedastisitas menyimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian dari residual

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kesimpulan ini diperoleh dengan melihat penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

**Gambar 3**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber :Data Olahan, 2016.

**Koefisien determinasi**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ), Tekanan Eksternal ( $X_2$ ), Komitmen Manajemen ( $X_3$ ), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ( $X_4$ ) dapat menjelaskan variabel Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini :

**Tabel 5**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.931 <sup>a</sup>	.867	.855	1.089	2.133

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x2, x3

b. Dependent Variable: y

Sumber :Data Olahan, 2016.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda terhadap model penelitian yang diajukan dilakukan dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 17.

**Tabel 6**  
**Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.311	1.268		.246	.807
TOTAL X1	.104	.047	.132	2.194	.034
TOTAL X2	.155	.070	.174	2.204	.033
TOTAL X3	.348	.071	.416	4.912	.000
TOTAL X4	.377	.091	.395	4.138	.000

Sumber : Data Olahan, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara parsial nilai  $t_{hitung}$  Akuntabilitas sebesar 2.194, nilai  $t_{hitung}$  Tekanan Eksternal sebesar 2.024, nilai  $t_{hitung}$  Komitmen Manajemen sebesar 4.912, dan nilai  $t_{hitung}$  Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 4.138. Nilai  $t_{tabel}$  df ( $n-k-1=48-4-1=43$ ),  $\alpha 5\% / 2$  adalah 1.677.

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen :

#### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>1</sub>

**H<sub>1</sub>: Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.**

Dari data yang diperoleh pada tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 2.194 > 1,677 dan sig.t (0,034) < 0,05 dengan demikian H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima.

Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu

Akuntabilitas berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Dalam penelitian ini, Akuntabilitas mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, ini berarti apabila Akuntabilitas dikelola dengan baik akan menghasilkan akuntabilitas yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan , pembuatan laporan keuangan sampai Pelaporan menjadi semakin baik pula.

#### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>2</sub>

**H<sub>2</sub>: Tekanan Eksternal Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Dari data yang diperoleh pada Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 2,204 > 1,677 dan sig.t (0,033) < 0,05 dengan demikian H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>2</sub> diterima.

Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Dalam penelitian ini, Tekanan Eksternal mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, ini berarti Tekanan Eksternal undang-undang atau Peraturan Peraturan menjadi pendorong untuk di terapkanya Transparansi Pelaporan Keuangan berjalan dengan baik karna hasil dari analisi data memberikan hasil bahwa Tekanan Eksternal Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. dan bisa dikatakan bahwa Tekanan Eksternal mendorong terciptanya Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan yang baik Pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

### **Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>3</sub>**

#### **H<sub>3</sub>: Komitmen Manajemen Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Dari data yang diperoleh pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,912 > 1,667$  dan  $sig.t (0,000) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.

Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Dalam penelitian ini, Komitmen Manajemen merupakan Faktor yang dapat mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan karena terdapat pengaruh positif antara Komitmen Manajemen dengan Penerapan transparansi Pelaporan Keuangan dilihat dari hasil Olah data spps itu artinya Komitmen Manajemen dapat meningkatkan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Menjadi lebih baik.

### **Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>4</sub>**

#### **H<sub>3</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Dari data yang diperoleh pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,138 > 1,667$  dan  $sig.t (0,000) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima.

Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh

terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika Kompetensi SDM dalam setiap SKPD baik, maka Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan akan berjalan dengan baik pula.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam penelitian ini, Akuntabilitas mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, ini berarti apabila Akuntabilitas dikelola dengan baik akan menghasilkan akuntabilitas yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan ,pembuatan laporan keuangan sampai Pelaporan menjadi semakin baik pula.
- 2) Dalam penelitian ini, Tekanan Eksternal mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, ini berarti Tekanan Eksternal undang-undang atau Peraturan Peraturan menjadi pendorong untuk di terapkanya Transparansi Pelaporan Keuangan berjalan dengan baik karna hasil dari analisi data memberikan hasil bahwa Tekanan Eksternal Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.dan bisa dikatakan bahwa Tekanan Eksternal mendorong Terciptanya Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan yang baik

Pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu..

- 3) Dalam penelitian ini, Komitmen Manajemen merupakan Faktor yang dapat mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan karna terdapat pengaruh positif antara Komitmen Manajemen dengan Penerapan transparansi Pelaporan Keuangan dilihat dari hasil Olah data spps itu artinya Komitmen Manajemen dapat meningkatkan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Menjadi lebih baik.
- 4) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika Kompetensi SDM dalam setiap SKPD baik, maka Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan akan berjalan dengan baik pula.

#### **Keterbatasan**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari masing-masing Kepala SKPD dan Kasubag Keuangan, dan responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga penulis tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh

responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

2. Objek penelitian hanya menggunakan satu satuan saja, yaitu SKPD. Objek penelitian yang terbatas tersebut tentunya mempengaruhi hasil penelitian ini.
3. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan satu lokasi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan hanya lingkup Kabupaten/ kota saja, yaitu SKPD Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **Saran**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu:

- 1) Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih luas dan cangkupan satuan kerjanya karna satuan kerja yang lebih luas diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi yang berbeda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amstrong, 1999. *Seri Pedoman Manajemen "Manajemen Sumber Daya"*. Jakarta.
- Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz. 2007. *Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations*. Journal

- of Public Administration Research and Theory.
- Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Business Ethics Quarterly*.
- Indriantoro. 2002. Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasional terhadap Keefektifan Anggaran Partisipatif dalam Peningkatan Kinerja Manajerial : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Kelola* No. 18/VII : 61-150.
- Mardiasmo.2012. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*.Jurnal Ekonomi Rakyat. Tersedia di[http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_4/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm),  
2012. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki.2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan SKPD*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 2012.
- Scott. 1987. "An Exploration of The Espoused Organizational Cultures of Public Accounting Firms". *Accounting Horizons*. Vol. 10 No. 3. September. Pp. 26-53.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis.Cetakan ke-12.Bandung:CV Alfabeta.
- Silver, D. 2005. Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist*.
- Sukhemi, 2011. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Volume 5, April: 85-100.
- Wahyuni, Desi.2014. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan SKPD *Kampar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor (71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.